Jurnal Andi Djemma │ Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 98-115

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA MADRASAH IBTIDAIYAH DI KOTA MAKASSAR

Suparman Mannuhung
(Dosen Pendidikan Agama Islam Univ. Andi Djemma Email: mzaid090609@gmail.com)

Abstrak. Tesis ini membahas tentang efektifitas pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri atas Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama (Mapenda), Kepala Madrasah Ibtidaiyah, para pendidik (guru). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang sudah ada dikelola melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan dana BOS pada Madrasah Ibitidaiyah di Kota Makassar telah dilakukan secara maksimal sekitar 90% berdasarkan buku petunjuk teknis dari Dirjen Pendidikan Islam dan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini dimulai dari perencanaan pengelolaan dana BOS dengan melakukan sosialisasi penggunaan dana BOS setiap tahun anggaran agar semua pihak madrasah mengerti dan mengetahui laporan pertanggung jawaban dana BOS setiap tahapan triwulan.

Bantuan dana BOS pada Madrasah Ibitidaiyah di Kota Makassar belum mampu meningkatkan mutu pendidikan secara maksimal dengan berdasar pada UU No. 20 Tahun 2003 dan 8 Standar Nasional Pendidikan, sehingga perlu adanya peningkatan jumlah anggaran sekitar Rp. 1.900.000. per-tahun per-siswa. Implikasi dari peneilitian ini adalah hendaknya para pengelola dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah (Kepala Madrasah, Bendahara BOS, Pengurus Komite, dan Pengurus Yayasan) dalam melaksanakan dan menganggarkan dana BOS seharusnya mengikuti buku petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Kata Kunci : Efektifitas, BOS, Mutu Pendidikan, Madrasah.

PENDAHULUAN

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pencapaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan (A-4), (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai (A-4). Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 98-115

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS Sekolah/Madrasah, Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS/M, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Tomy Setiawan, menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS yaitu; efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Pertama, efisien maksudnya adalah dana yang telah didapatkan oleh sekolah/madrasah digunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatiakan kebutuhan-kebutuhan. Artinya bantuan tersebut jangan sampai salah penggunaan dan tepat sasaran. Kedua, efektifitas maksudnya adalah kelanjutan dari efisien diatas, artinya efektifitas sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga, transparansi. Transparansi ini sangat penting, karena jika dari pihak sekolah kurang adanaya transparansi maka dari pihak wali murid juga akan melakukan protes kepada sekolah. Dan ini dimasudkan untuk mengurangi tingkat penyelewengan dari pihak sekolah. Keempat, akuntabilitas maksudnya adalah dalam pencairan dana BOS ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah swt. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika keempat hal yang telah dijelaskan di atas dilakukan dengan baik, maka bantuan BOS dalam penyalurannya akan tepat sasaran. Dan bantuan ini akan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang kurang mampu/miskin.

Sosialisasi dana BOS ini belum dilakukan dengan baik. Penyimpangan dana BOS pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyimpangan terjadi karena ketidaktahuan orang tua tentang BOS. Kurangnya informasi ini dimanfaatkan oleh pihak sekolah/madrasah untuk memungut biaya dari siswa yang sebenarnya dapat ditutupi dari BOS. Penyusunan rencana penggunaan BOS yang diajukan oleh sekolah/madrash tidak mengikutsertakan wali murid dan tidak dicantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M). Hal ini mengakibatkan banyak orang tua yang tidak mengetahui BOS maupun penggunaannya. Pada tingkat SD/MI ataupun SMP/MTs dan sederajat, pungutan sebelum serta sesudah ada dana BOS tetap marak. Padahal, logikanya, tambahan anggaran paling tidak dapat membuat biaya penyelenggaraan sekolah/madrash lebih murah.

Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menggambarkan sejak program BOS diluncurkan tahun 2005, pungli dan penyimpangan selalu mengiringinya. Sudah menjadi simbiosis mutualisme antara sekolah dan dinas pendidikan dan pihak terkait berkenaan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 98-115

itu, dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan dalam mengawal BOS. Berdasarkan laporan ICW tentang dugaan korupsi anggaran pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 142 kasus korupsi anggaran pendidikan periode 2004-2009 diperkirakan total kerugian negara mencapai Rp 243 miliar.

Dari beberapa temuan terhadap kasus dan permasalahan yang terjadi diatas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana BOS pada tingkat Sekolah/madrasah belum berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran dan tujuannya serta pengelolaannya belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bagian dari prinsip dasar untuk mewujudkan *good governance.*

Pengelolaan dana BOS di SD/MI tersebut harus dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan khususnya masyarakat miskin, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, hal ini mengingat bahwa salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI dan sederajat.

Berdasarkan latar latar belakang permasalahan diatas maka pada penelitian ini, peneliti ingin mengungkap secara mendalaman tentang bagaimana efektifitas pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengkatkan mutu pendidikan, khususnya pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kota Makassar.

TINJAUAN TEORETIS

A. Efektifitas penggunaan dana BOS.

a. Pengertian efektifitas dan bentuk-bentuknya

Kata efektif berarti ; tepat, manjur, mujarab, tepat guna, berhasil dan efektifitas berarti ketepatgunaan, hasil guna, dan menunjang tujuan. Kata "efektifitas" yang manknanya "keefektifan" yakni : 1. Keadaan berpengaruh; hal berkesan ; 2. Kemanjuran; kemujaraban; 3. Keberhasilan; 4. Hal mulai berlakunya undang-undang dan peraturan. Dan kata "efektifitas" dampak dari suatu perubahan/hasil terbaik yang diharapkan dari suatu perubahan tersebut. Efektifitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil yang dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu maupun benda lainnya.

Efektifitas secara umum menujukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telebih dahulu ditentukan. menurut Hidayat menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar prosentase target yang

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 98-115

dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Menurut Prasetyo Budi Saksono, efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Efektifitas setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, karena merupakan sumber daya yang umum bagi semua organisasi. Kinerja organisasi tergantung dari keinerja individu, dan manajer/pimpinan harus mempunyai kemauan lebih dari sekedar pengetahuan dalam hal penentuan kinerja individu. Gibson mengatkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas kerja adalah : a) motivasi kerja, b) kemampuan kerja, c) suasana kerja, d) lingkungan kerja, e) perlengkapan dan fasilitas, f) prosedur kerja.

b. Pelaksanaan dana BOS.

1. Pengertian BOS.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

3. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua MI, MTs dan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Ula dan Wustha penyelenggara Wajar Dikdas di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki ijin operasional.

c. Waktu Pencairan Dana

Untuk madrasah negeri Tahun Anggaran 2011, dana BOS telah dialokasikan dalam DIPA Satker selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2011, dan pencairan dananya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan madrasah.

B. Penggunaan dana BOS di madrasah

1. Dana BOS di Madrasah

Sumber dana program BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan keuangan yang meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Selain itu, ada ketentuan teknis lain yang bersifat mempertegas dan memperjelas pelaksanaannya.

Pengelolaan program melibatkan berbagai unsur antara lain Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, Madrasah/PPS, Lembaga Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Semua unsur

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 98-115

tersebut memerlukan pemahaman yang sama guna menghindari timbulnya hambatan dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Agama menyusun Petunjuk Teknis Keuangan sebagai acuan untuk pelaksanaan program BOS agar para pengelola di tingkat Provinsi, kabupaten/kota, dan madrasah/PPS dapat memenuhi tugasnya dengan mudah. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Manajemen BOS dapat dijalankan dengan baik.

2. Perbedaan pelaksanaan dana BOS di Madrasah dan Sekolah

Pelaksanaan dana BOS di madrasah dianggarkan pada anggaran pusat Kementerian Agama RI dan disalurkan langsung ke rekening kepala madrasah bagi swasta dengan dicairkan lewat BANK BRI dan melalui satker bagi madrasah negeri sedangkan dana BOS di sekolah lewat kementerian pendidikan dan dikelola pemerintah setempat kemudian dicairkan lewat rekening Koran BANK BPD

C. Mutu pendidikan di madrasah

1. Pengertian mutu

Defenisi mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam bergantung orang yang memakainya. Mutu berasal dari bahasa latin yakni "Qualis" yang berarti what kind of (tergantung kata apa yang mengikutinya). Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan kebutuhan.

Masih dalam buku yang sama petikan dari Sallis mengemukakan mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi. Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat yang telah ditetapkan atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

2. Pencapaian mutu pendidikan

Untuk bias menghasilkan mutu, menurut Slamet terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu :

a) menciptakan situasi "menang-menang" (win-win solution) dan bukan situasi "kalah-menang" diantara fihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (stakeholders). Dalam hal ini antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam merahi mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut

b) perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi instrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses merahi mutu. Setiap orang dalam lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguana/pelanggan.

c) setiap pimpinan harus beriorentasi pada proses dan hasil jangka panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah suatu proses

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 98-115

perubahan jangka pendek, tapi usaha jangka panjang yang konsisten dan terus menerus.

d) dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai mutu. Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk menghasilkan mutu sesuai yang diharapkan.

3. Peningkatan mutu pendidikan di madrasah

Masyarakat Indonesia tidak sedikit yang lebih mempercayai lembaga pendidikan madrasah daripada sekolah umum. Kementerian Agama mencatat bahwa jumlah lembaga pendidikan madrasah tidak kurang dari 18 % dari seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Pada umumnya, (95%) madrasah berstatus swasta. Hanya sebagian kecil yang berstatus negeri. Lembaga pendidikan Islam ini diminati oleh masyarakat yang menghendaki para putra-putrinya memperoleh pendidikan agama yang cukup sekaligus pendidikan umum yang memadai.

Sebagian banyak madrasah, jika dilihat dari hasil Nilai Ujian Nasional pada umumnya masih rendah apalagi bila dibandingkan dengan sekolah umum pada umumnya. Kecuali beberapa yang rupanya ditangani secara khusus, ternyata juga berhasil unggul dan dapat meraih prestasi lebih tinggi bilamana dibandingkan dengan prestasi sekolah umum pada umumnya. Tetapi jumlah yang berhasil berprestasi seperti ini masih terbatas jumlahnya. Sebut saja misalnya, sebagai contoh Madrasah Terpadu Malang, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri Malang, Madrasah Tsanawiyah Makassar dan Madrasah Aliyah Model (MAN 2) Makasar, prestasi akadmiknya setiap tahun selalu unggul dan dapat bersaing dengan lembaga pendidikan pada ummnya.

Berbeda dengan sekolah umum, madrasah yang pada umumnya berstatus swasta, maka selalu saja mengalami serba kekurangan, misalnya guru yang mengajar belum tentu memperoleh imbalan kesejahteraan yang cukup, buku-buku belum tentu tersedia dan apalagi sarana dan prasarana lainnya. Demikian pula, beban belajar siswa, jumlahnya jelas lebih banyak. Pengertian terbaru madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Mata pelajaran yang bernuansa muatan ciri khas jumlahnya tidak sedikit, yang hal ini merupakan beban tersendiri bagi para siswa. Siswa madrasah kemudian mengikuti dua jenis ujian, yaitu ujian madrasah (mata pelajaran ciri khas), dan juga mengikuti ujian akhir nasional. Ironisnya yang dilihat tatkala melihat mutu madrasah hanya tertuju pada ujian akhir nasional, dan tidak memperhatikan prestasi lainnya, misalnya keberhasilannya dalam memperoleh prastasi kecerdasan spiritual mapun emosionalnya.

Jurnal Andi Djemma │ Jurnal Pendidikan
P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 98-115

METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok.

Peneliti langsung masuk ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kebijakan pemberian dana BOS. Data yang dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi dan peristiwa yang diobservasi. Pengumpulan data/informasi ini peneliti sekaligus sebagai instrumen yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (Indepth interview), oleh karenanya Peneliti akan mencatat, serta menggunakan dukungan alat perekam, dan mengamati perilaku orang yang diwawancarai.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kota Makassar dalam naungan Kementerian Agama Kota Makassar.

3. Instrumen penelitian

Penelitian ini rencananya akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang diperkaya dengan kuantitatif.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

a) Data primer, dalam penelitian lapangan, data primer merupakan data utama yang diambil langsung di lokasi penelitian.

b) Data sekunder, merupakan pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan peneliti secara langsung. Data ini berupa dokumentasi penting menyangkut laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana BOS, dan arsip administrasi lainnya yang relevan dengan topik kajian dalam penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut :

a) Observasi atau pengamatan

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan.

b) Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam

(indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sedang diamati yaitu MI Negeri dan Swasta di Kota Makassar.

c) Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari Lembaga/Organisasi yang telah melaksanakan Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku pihak yang telah penerima dana bantuan BOS sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan.

6. Metode Analisis Data

Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendiskrepsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci.

Analisa tabel tunggal dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan metode survai, sedangkan untuk data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam. Dalam pelaksanaan analsis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Uraian data jenis ini berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka atau tabel-tabel. Untuk itu data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang mudah dipahami dan diuraikan.

HASIL PENELITIAN

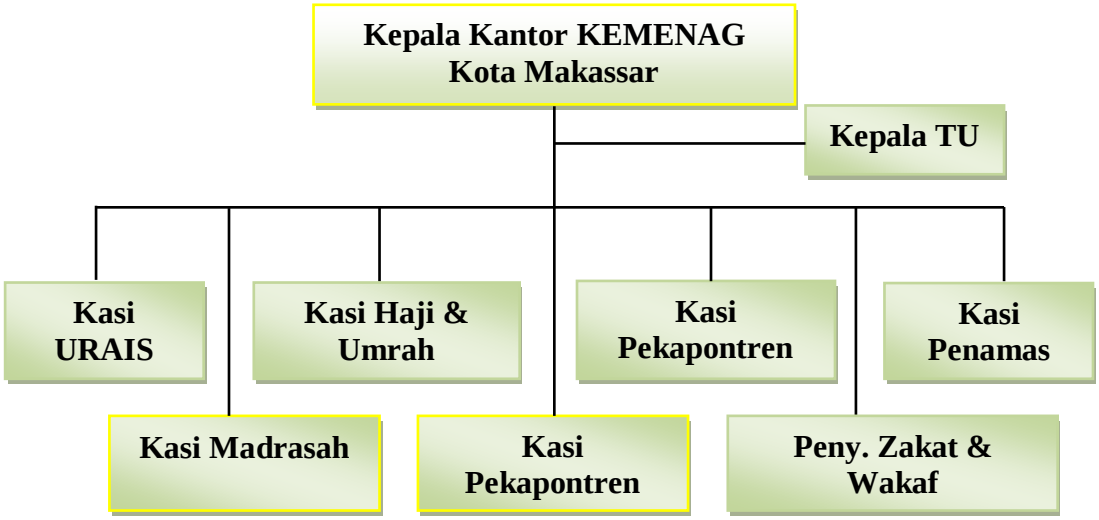
1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai, sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km^2.

Kementerian Agama Kota Makassar adalah instansi Negara Republik Indonesia yang secara khusus diberi kewenangan menyelenggarakan dan membina pendidikan agama dan keagamaan khususnya pendidikan madrasah pada tingkat

wilayah Kota Makassar yang secara teknis dan pembinaan kepala kantor memberikan wewenang kepada Kepala Seksi Mapenda.

Struktur Organisasi
Kementerian Agama Kota Makassar



(Sumber : Tata Usaha Kementerian Agama Kota Makassar)

Madrasah dalam naungan Kementerian Agama Kota Makassar menjadi lokasi penelitian kemudian peneliti menetapkan madrasah ibtidaiyah yang dijadikan sampel penelitian dengan memilih berdasarkan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) adalah sebagai berikut ; *MI AT-TAQWA Panaikang, MIS DDI As'adiyah 170 Layang, MI Muhammadiyah (MIM) Pannampu, MIS DDI Gusung, MIN Banta-Bantaeng, MIN 2 Biringkanaya*

2. Pelaksanaan dana BOS di Kota Makassar

Salah satu program pemerintah yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui program BOS pemerintah memberikan dana kesekolah dan madrasah yakni SD dan MI negeri maupun swasta yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam program BOS. Adapun tujuan program BOS adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dan tidak mampu serta meringankan beban dalam rangka Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Kepala Seksi Kementerian Agama Kota Makassar telah mangadakan sosialisasi tiap tahun anggaran tentang mekanisme dan petunjuk teknis Dana BOS agar supaya pihak Madrasah Ibtidaiyah dalam mengelola dana BOS pada satuan Madrasah Ibtidaiyah lancar dengan baik. Pada pembahasan ini akan disajikan hasil

penelitian tentang pelaksanaan dana BOS pada Madrasah Ibitidaiyah di Kota Makassar.

Realisasi penyaluran dan pencairan dana BOS ke Madrasah pada tahun 2012 khusus untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta sebesar Rp. 4.492.390.000,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Realisasi pencairan dana BOS dilakukan melalui empat tahap, yaitu tahap pertama bulan Januari-Maret 2012, tahap kedua bulan April-Juni 2012, tahap ketiga bulan Juli-September 2012 dan tahap keempat bulan Oktober-Desember 2012. Untuk mengetahui besaran yang diterima dana BOS pada masing-masing Madrasah Ibtidaiyah pada tabel X di bawah ini ;

Tabel
Rekap Realisasi Daftar Penerima Dana Bantuan Opersional Sekolah
Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Swasta Triwulan I-IV
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012

No	Nama Madrasah Ibtidaiyah	Rekap Dana BOS T.A. 2012				Ket.
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
	Tingkat MI	(Jan-Maret)	(April-Juni)	(Juli-Septem.)	(Okto-Des.)	
1	MIS DDI Kalukuang	33.495.000	33.495.000	33.495.000	28.565.000	
2	MIS Al Muzahwirah	21.025.000	22.185.000	21.605.000	17.980.000	
3	MI Syeh Muh Samman	17.400.000	17.690.000	17.545.000	15.225.000	
4	MIM 6 Syuhada	18.560.000	18.560.000	18.560.000	15.080.000	
5	MIM Pannampu	27.550.000	27.550.000	27.550.000	20.735.000	
6	MIS Darul Aman	20.445.000	16.675.000	18.560.000	15.515.000	
7	MIM 8 Maccini	25.375.000	25.245.000	25.810.000	20.300.000	
8	MIM 11 Bara-Baraya	14.355.000	15.805.000	15.080.000	15.805.000	
9	MIS Darul Hikmah	22.620.000	19.430.000	21.025.000	25.665.000	
10	MIS Nasrul Haq	29.435.000	29.435.000	29.435.000	31.030.000	
11	MIS DDI Mariso	24.505.000	25.375.000	24.940.000	20.445.000	
12	MIS DDI Ainussyamsi L	27.115.000	30.305.000	28.710.000	26.245.000	
13	MIS MDIA Taqwa	3.915.000	3.915.000	3.915.000	2.030.000	
14	MIS DDI Malmongan T	3.190.000	3.770.000	3.480.000	0	
15	MIS Tajmilul Akhlak	17.110.000	17.110.000	17.110.000	14.790.000	
16	MIS At-Taqwa Pnaikang	24.505.000	24.215.000	24.360.000	18.270.000	
17	MIS Natsfiamin	27.115.000	25.084.000	26.100.000	20.300.000	
18	MIS Ulul Al Bab	37.120.000	28.420.000	32.770.000	17.980.000	
19	MIS An-Nashar Timor2	15.515.000	16.965.000	16.240.000	14.645.000	
20	MIS Jamiatul Khaer	20.590.000	22.910.000	21.750.000	16.530.000	
21	MIS Al-Abrar	64.960.000	58.290.000	61.625.000	61.045.000	
22	MIS Al-Hidayah	41.035.000	41.035.000	41.035.000	34.510.000	
23	MIS Darul Istiqamah	14.500.000	10.730.000	12.615.000	10.295.000	
24	MIS DDI Darul Ihsan	29.580.000	13.920.000	21.750.000	15.080.000	
25	MIS DDI RT.II U Tanah	22.040.000	21.460.000	21.750.000	18.560.000	
26	MIS DDI Galesong Baru	9.860.000	7.540.000	8.700.000	3.770.000	

27	MIS DDI Rampe Gading	10.150.000	10.150.000	10.150.000	9.135.000	
28	MIS MDIA Paotere	16.675.000	16.965.000	16.820.000	14.355.000	
29	MIS DDI Gusung	26.825.000	26.825.000	26.825.000	23.925.000	
30	MIS Ma'arif	15.225.000	15.225.000	15.225.000	14.500.000	
31	MIS At-Tanwitul Ilmiya	30.160.000	29.290.000	29.725.000	26.825.000	
32	MIS As'adiyah 170 Lyg	35.815.000	35.815.000	35.815.000	30.595.000	
33	MIS Nurul Ihsan Layang	15.080.000	15.080.000	15.080.000	16.095.000	
34	MIS TPI	28.565.000	28.565.000	28.565.000	21.895.000	
35	MIS Yaspi Sam. Jawa	60.610.000	61.190.000	60.900.000	45.530.000	
36	MIS Ra. Adhawiyah	52.200.000	20.880.000	36.540.000	35.050.000	
37	MIS Khaerunnas	24.215.000	24.215.000	24.215.000	21.460.000	
38	MIS Miftahul Khaer	17.690.000	16.240.000	16.965.000	14.500.000	
39	MIS Mulya Handayani	21.750.000	23.200.000	22.475.000	20.300.000	
40	MIS Mftahul Khaer Hart	26.100.000	25.230.000	25.665.000	21.895.000	
41	MIS Al Hijrah	9.570.000	8.120.000	8.845.000	10.005.000	
42	MIS Faqihul Ilmi	20.880.000	22.910.000	21.895.000	26.100.000	
43	MIS TQ' Azhar Center	23.055.000	20.735.000	21.895.000	26.100.000	
44	MIS Fathurrahman	18.995.000	14.935.000	16.965.000	22.330.000	
45	MIS T Yaa Bunayyah	11.020.000	11.020.000	11.020.000	12.035.000	
46	MIS Ummu Kaltsum	10.150.000	20.300.000	15.225.000	21.170.000	
47	MIS Addariyah	9.290.000	9.570.000	9.452.000	8.555.000	
48	MIS MDIA Bontoala	5.355.000	0	2.900.000	2.465.000	
49	MIS Nurul Hasanah	9.135.000	11.745.000	10.440.000	17.545.000	
50	MIS Abu Hurairah	11.600.000	12.470.000	12.035.000	12.035.000	
51	MIS As Syifa	11.600.000	11.600.000	11.600.000	9.860.000	
52	MIS Al Fathanah	11.600.000	11.600.000	11.600.000	9.860.000	
53	MIS As Sumairiyah	1.450.000	1.450.000	1.450.000	2.900.000	
54	MIS Al Bashirah	9.715.000	9.715.000	9.715.000	14.500.000	
55	MIS Al Humaerah	5.075.000	2.175.000	3.625.000	6.815.000	
56	MIS Ulul Azmi	4.640.000	8.700.000	6.670.000	18.850.000	
57	MIS Farida Aryani	4.350.000	4.350.000	4.350.000	8.120.000	
58	MIS T. Insan Cendikia	0	0	24.940.000	26.680.000	
Jumlah Total		1.171.455.000	1.108.380.000	1.140.135.000	1.072.420.000	4.492.390.000

(Sumber : Kepala Bidang Mapenda Kemenag Prov. Sul-sel)

Realisasi pencairan dana BOS *tahap pertama* adalah pada bulan Januari-Maret 2012 sebesar Rp. 1.171.455.000 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah siswa sebanyak 8.079 anak didik. Proses pencairan dana dilakukan TIM Manajemen BOS Bidang Mapenda Kementerian Agama Provinsi Sulawesi-Selatan dengan menerbitkan Surat Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penampung yang selanjutnya Bank melakukan penyaluran/pencairan langsung ke-nomor rekening madrasah, dan telah disalurkan langsung pada tanggal 16 Januari 2012 ke masing-masing rekening madrasah melalui nomor rekening madrasah

dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini dikarenakan dasar perolehan dana BOS bersasarkan jumlah siswa yang ada pada masing-masing Madrasah Ibtidaiyah. Untuk mengetahui secara lebih detail dapat dilihat pada tabel X di atas atau lampiran A.

Bersarkan tabel X di atas atau lampiran A tersebut dari 57 MI Swasta penerima dana BOS yang menepati rengking tertinggi adalah MIS Al Abrar yaitu sebesar Rp. 64.960.000,00 dengan jumlah siswa 448 anak didik dan urutan kedua adalah MIS Yaspi Sambung Jawa sebesar Rp. 60.610.000,00 dengan jumlah siswa 418 anak didik. Mekanisme pencairan dana BOS dengan model seperti ini sangat efektif dan efisien karena uang dapat diterima secara utuh.

Sedangkan realisasi pencairan dana BOS *tahap kedua* dilakukan pada bulan April-Juni 2012 tanggal 16 April 2012 sebesar Rp. 1.108.380.000,00 (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah murid sebanyak 8.079 anak didik dan jumlah MI Swasta sebanyak 56, dana BOS tersebut telah disalurkan lansung ke-masing-masing MI Swasta melalui nomor rekening madrasah dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini dikarenakan dasar perolehan dana BOS bersarkan jumlah anak didik yang ada pada masing-masing madrasah. Untuk mengetahui lebih detail MI Swasta di Kota Makassar pada tahap kedua dapat dilihat sebagaimana pada tabel X di atas atau lampiran B.

Berdasarkan tabel X di atas atau lampiran B tersebut dari 56 MI Swasta penerima dana BOS yang menempati rangking tertinggi adalah MIS Yaspi Sambung Jawa sebesar Rp. 61.190.000,00 dengan jumlah siswa 422 anak didik dan urutan kedua adalah MIS Al Abrar yaitu sebesar Rp. 58.290.000,00 dengan jumlah siswa 402 anak didik dan ditransfer lansung ke rekening masing-masing madrasah. Mekanisme pencairan dana BOS dengan model seperti ini sangat efektif dan efisien karena uang dapat diterima secara utuh.

Sedangkan realisasi pencairan dana BOS *tahap ketiga* dilakukan pada bulan Juli-September 2012 tanggal 10 Julil 2012 sebesar Rp. 1.140.135.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah murid sebanyak 8.035 anak didik dan jumlah MI Swasta sebanyak 58, dana BOS tersebut telah disalurkan lansung ke-masing-masing MI Swasta melalui nomor rekening madrasah dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini dikarenakan dasar perolehan dana BOS bersarkan jumlah anak didik yang ada pada masing-masing madrasah. Untuk mengetahui lebih detail MI Swasta di Kota Makassar pada tahap ketiga dapat dilihat pada tabel X di atas atau lampiran C.

Bersarkan tabel X di atas atau lampiran C tersebut dari 58 MI Swasta penerima dana BOS yang menempati rengking tertinggi adalah MIS Al Abrar sebesar Rp. 61.625.000,00 dengan jumlah siswa 425 anak didik dan urutan kedua adalah MIS Yaspi Sambung Jawa yaitu sebesar Rp. 60.900.000,00 dengan jumlah siswa 420 anak didik dan ditransfer lansung ke rekening masing-masing madrasah.

Mekanisme pencairan dana BOS dengan model seperti ini sangat efektif dan efisien karena uang dapat dapat diterima secara utuh.

Sedangkan realisasi pencairan dana BOS *tahap keempat* dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2012 tanggal 10 Juli 2012 sebesar Rp. 1.072.420.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah murid sebanyak 7.396 anak didik dan jumlah MI Swasta sebanyak 57, dana BOS tersebut telah disalurkan lansung ke-masing-masing MI Swasta melauli nomor rekening madrasah dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini dikarenakan dasar perolehan dana BOS bersarkan jumlah anak didik yang ada pada masing-masing madrasah. Untuk mengetahui lebih detail MI Swasta di Kota Makassar pada tahap ketiga dapat dilihat pada tabel X di atas atau lampiran D.

Bersarkan tabel X di atas atau lampiran D tersebut dari 57 MI Swasta penerima dana BOS yang menempati rangking tertinggi adalah MIS Al Abrar sebesar Rp. 61.045.000,00 dengan jumlah siswa 421 anak didik dan urutan kedua adalah MIS Yaspi Sambung Jawa yaitu sebesar Rp. 45.530.000,00 dengan jumlah siswa 314 anak didik dan ditransfer lansung ke rekening masing-masing madrasah. Mekanisme pencairan dana BOS dengan model seperti ini sangat efektif dan efisien karena uang dapat dapat diterima secara utuh.

Berdasarkan tabel X di atas atau lampiran D, pada *tahap keempat* pengelola dana BOS Madrasah Ibitidaiyah Swasta Kota Makassar, memberikan sanksi kepada MI Malimongan Tua pada wilayah KKM IV berupa pencoretan pengusulan pemerimaan dana BOS karena tidak pernah datang melapor dan tidak bisa dihubungi untuk keperluan konfirmasi sehingga tidak ada toleransi kepada seluruh madrasah yang tidak mengikuti mekanisme yang ada.

Berdasarkan tabel X di atas tersebut, maka jumlah total keseluruhan dana BOS pada tahap pertama sampai dengan tahap keempat sebanyak Rp. 4.492.390.000,-. (empat milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupaiah) dengan jumlah siswa sebanyak 31127 anak didik.

3. Efektivitas Pelaksanaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar

1) KKM I (Kelompok Kerja Madrasah)

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara dana BOS MIS At-Taqwa Panaikang sebagai Ketua KKM I, dengan adanya dana BOS para pembina sangat terbantu untuk mengikuti pelatihan, membantu pelajar dalam proses belajar mengajar, dalam hal sarana dan prasarana juga dianggarkan dari dana BOS, untuk standar pembiayaan semua dianggarkan dari dana BOS, untuk standar penilaian MIS At-Taqwa Panaikan sudah diakreditasi dengan nilai B. Untuk mutu sebelum adanya dana BOS sangat rendah karena siswa terkadang tidak datang sekolah karena belum membayar SPP, buku-buku masih minim dan setelah adanya dana BOS bisa meringankan biaya sekolah, buku cetak yang selama ini harus dibeli

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 98-115

siswa sudah disiapkan sekolah sehingga mutu bisa ditingkatkan. Sekitar 90% keberhasilan mutu yang kami capai setelah adanya dana BOS.

2) KKM II (Kelompok Kerja Madrasah)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala MIS DDI 170 Layang, selaku Ketua KKM II dan Ketua KKKM Kota Makassar, sebelum adanya dana BOS. Mutu standar tidak mampu kami capai seperti guru mengajar dengan baik, diluar jam pelajaran juga diadakan latihan tabligh, guru-guru sudah memenuhi standar Sarjana. Standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah bisa dipenuhi walau belum bisa dibandingkan dengan sekolah Favorit. Standar penilaian sudah dapat nilai C dalam penilaian akreditasi. Mutu yang dihasilkan dengan adanya dana BOS sekitar 90% tenaga pengajar disiplin, masyarakat pun tertarik untuk menyekolahkan anaknya.

Sebelum adanya dana BOS, yang paling utama diusahakan di madrasah adalah penanaman kepada Bapak/Ibu Guru tentang keadaan financial yang minim namun harus tetap semangat dengan bantuan yayasan. Setelah adanya dana BOS, guru sudah mempunyai dinas seragam. Yang sangat diperhatikan yaitu kejujuran untuk membangun kebersamaan persepsi tentang dana BOS yang tentunya disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing.

3) KKM III (Kelompok Kerja Madrasah)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala MIM Pannampu selaku Ketua KKM III, beliau mengatakan bahwa dengan adanya dana BOS bisa mencapai tujuan pendidikan nasional, dengan adanya dana BOS guru diberi insentif untuk mengikuti pelatihan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan sehingga bisa mengajar dengan baik. Buku-buku penunjang bisa sangat membantu. Dengan adanya dana BOS walaupun bertahap triwulan bisa sangat membantu madrasah kami.

4) KKM IV (Kelompok Kerja Madrasah)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala MIS DDI Gusung selaku Ketua KKM IV, dengan adanya dana BOS standar bisa tercapai dengan membuat perangkat pembelajaran. Standar proses mengadakan pelatihan bagi guru-guru dan mengundang guru-guru madrasah se-KKM IV. Dengan adanya dana BOS guru mengajar dengan lebih baik, standar pendidik dan tenaga kependidikan semua guru mengajar dengan sesuai kompetensinya, dan guru sudah mengetahui tugas-tugasnya. Standar sarana dan prasarana sudah bagus, standar pengelolaan dikelola dengan baik, pembiayaan guru digaji dari dana BOS. Standar penilaian nilainya semakin meningkat.

Efektifitas dana BOS di MIS DDI Gusung sangat efektif karena dibanding sebelumnya tidak ada dana BOS, sebelum adanya dana BOS dimana buku masih minim. Dengan adanya dana BOS sangat berpengaruh positif terhadap mutu madrasah ini sampai mencapai 90 %.

5) KKM V (Kelompok Kerja Madrasah)

P-ISSN: 2622-6537 & E-ISSN: 2622-8513
Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, hlm : 98-115

Berdasarkan wawancara dengan Kepala MIN 1 Banta-bantaeng selaku Ketua KKM V dan Bendahara KKKM Kota Makassar, mengatakan bahwa dana BOS itu sudah mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan. Dana BOS-nya madrasah ini sudah di akun-akun anggaran, misalnya standar proses kita fasilitasi guru dengan mengadakan alat pembelajaran seperti LC, laptop atau computer dan KIT IPA, untuk standar isi, madrasah ini memfasilitasi seluruh guru memberikan flashdisk untuk mendownload data-data, pelajaran di internet demi mempermudah pembelajaran, dan memberikan tunjangan guru kelas agar bisa lebih bertanggunjawab. Di madrasah ini sudah ada TIM Pengembang Madrasah, standar pendidik dan tenaga kependidikan guru sudah hampir 90% sudah disertifikasi. Standar sarana dan prasarana belum 100% karena terhambat dengan lokasi, dan tahun 2013 MIN 1 Banta-bantaeng akan dicanangkan dibangun lantai dua berhadapan dan sudah ada proposalnya untuk diajukan, ke depan akan dijadikan MIN Model. Standar penilaian yang awalnya bernilai C dan setelah didaftar ulang kembali pada tahun 2011 nilainya A.

Efektifitas pelaksanaan dana BOS di MIN 1 Banta-banteng sudah efektif kerena pos-pos anggaran sudah terencana, upaya dalam meningkatkan mutu madrasah sebelum adanya dana BOS yang awalnya berstatus swasta dikarenakan kurangnya dana untuk pengembangan dan setelah adanya dan BOS madrasah ini sudah dinegerikan dan mutu semakin meningkat. Dengan adanya dana BOS mutu harus meningkat karena sudah ada dana dari pemerintah.

6) KKM VI (Kelompok Kerja Madrasah)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala MIN 2 Biringkanaya selaku Ketua KKM VI, dana BOS sangat membantu 8 Standar Nasional Pendidikan, pada semua standar akan bisa membantu meskipun secara keseluruhan belum bisa memenuhi standar 100%. Mutu standar pendidik dan kependidikan akan diadakan kegiatan KKG karena sumber dananya dari dana BOS, semua sarana yang ada akan dianggarkan dari dana BOS seperti alat-alat olahraga, kesenian untuk prasarana seperti gedung dianggarkan lewat APBN. Standar pembiayaan di MIN 2 selain dana BOS juga punya dana rutin baik dari APBN dan APBD. Untuk standar penilaian dari BAN (Badan Akteditasi Nasional) sementara berjalan.

Pelaksanaan dana BOS di MIN 2 berjalan dengan baik dengan mencapai 100% dan semuanya harus terpakai, dan mengacu pada Buku Petunjuk Teknis harus dijalankan sesuai mekanisme. Upaya yang dilakukan sebelum adanya dana BOS ditanggung orangtua siswa sehingga memberatkan. Awalnya madrasah ini hanya persiapan MIN 2 Makassar. Sejak tahun 2007 sudah dapat dana BOS dan dinegerikan pada tahun 2009 dan sedikit demi sedikit orang tua dibebaskan dari segala biaya opersional sekolah. Dana BOS di MIN 2 sangat berpengaruh terkait mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik catatan penting sekaligus kesimpulan, sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan dana BOS pada Madrasah Ibitidaiyah di Kota Makassar telah dilakukan secara maksimal berdasarkan Buku Petunjuk Teknis dari Dirjen Pendidikan Ismal dan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini dimulai dari perencanaan pengelolaan dana BOS dengan melakukan sosialisasi penggunaan dana BOS setiap tahun anggaran agar semua pihak madrasah mengerti dan mengetahui laporan pertanggung jawaban dana BOS setiap tahapan triwulan. Namun hasil penelitian menjukkan bahwa masih adanya madrasah tidak mengikuti Buku Petunjuk Teknis sehingga diberi peringatan dan sanksi dari TIM Manajer dana BOS Madrasah Kota Makassar. Maka peneliti menyimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan dana BOS pada Madrasah Ibitidaiyah di Kota Makassar mencapai 90% (belum maksimal).
2. Mutu pendidikan pada Madrasah Ibitidaiyah (MI) sama dengan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) dengan berdasar pada UU No. 20 Tahun 2003 dan 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu ; 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Kelulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan,7) Standar Pembiayaan,dan 8) Standar Penilaian. Berdasarkan standar tersebut di atas jumlah dana BOS yang diberikan hanya Rp. 580.000, per-tahun per-siswa atau sekitar Rp. 48.333. Dengan dana tersebut Madrasah Ibitidaiyah hanya mampu meningkatkan mutu sekitar antara 90% secara keseluruhan karena MI Swasta bervariasi situasi dan kondisinya kecuali MI Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Arifin, *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*, Jakarta : Pustaka Indonesia, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta ; Edisi Rivisi VI : Rineka Cipta, 2006.

Dani H, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Edisi Lengkap, Gita Media Pres, 2010.

Dauly Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Cetakan Ke-2, Kencana Predana Media Group, 2009.

Direktorat Pendidikan Madrasah@copyright, *Pengertian dan Karakteristik Madrasah*, http///:www.Kemenag.go.id, diunduh pada tanggal 7 Juni 2012.

Efendi Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat,* Palembang : PT. Widyadara, 2001.

Erwantosi, *Analisis Efektifitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Bantuan Opersional Sekolah pada Sekolah Menegah Pertama di Kota Padang*, (diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2010). Sumber : repository.unand.ac.id.

Fatimatuzzuhroh Siti, *Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah (BOS) terhadap mutu pendidikan di SD Iskandar Said Surabaya,(diterbitkan Progam Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).*, Sumber : eprints.sunan-ampel.ac.id

Fasli Djalal dan Supriadi Dedi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Adi Citra, 2001.

Hadis Abdul, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung : Cetakan Pertama, Alfabeta, 2010.

J Moleong. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Gibson Ivancevich Donnely, *Organisasi dan Managemen*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1984.

Karding, Abdul Kadir *"Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang"* Sumber : eprints.undip.ac.id. Tesis Diterbitkan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang , 2008.

Materi Pelatihan BOS Pada Sekolah/Madrasah : Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah / Madrasah, Bank Dunia, Australian AID, ADB, USAID, Indonesia : Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI, 2011.

Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung : Cetakan Ketiga /Edisi Revisi, PT. Refika Aditama, 2011.

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Problem Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*, (http://www.uin-malang.ac.id) diunduh pada tanggal 22 Agustus 2012.

Ridwan dan H. Sonarno, , *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi Komunikasi dan Bisnis*, Bandung : Alfabeth, 2009.

Ruswati, *Efektifitas Pelayanan Publik : Pengaruh Disiplin dan Iklim Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan Aparat Pemerintah*, September 2009, (http://www.suarapembaruan.com)

Setiawan Tomy, *Ajarai Sekolah Soal Transparansi* , Harian Jogja 1 September 2009, (http://www/suarapembaharuan.com)

Syaifudin Muh., *Manajemen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ketanggung Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi*, Sumber : digilib.umm.ac.id.pdf.diterbitkan Pprogram Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Malang, 2006.

Suderadjat Hari, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan*

Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK, Bandung : Cipta Lekas Garafika, 2005.

Slamet, Margono, *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu*, Bogor : Institut Pertanian Bogor, 1999. (www.uns.ac.id)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Amandemen I-IV, Yogyakarta : Penabur Ilmu, 2008.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung : Citra Umbata, 2003.

Usman Husaini, *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Yayasan Perguruan Tinggi Al Gazali). Universitas Islam Makassar, 2011.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Negeri Tahun Anggaran 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Direktur : Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Swasta Tahun Anggaran 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Direktur : Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturat Direktur Jendereal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009.

Richard M, *Efektifitas Organisasi*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1985.

Widoyoko Eko Putro, *Evaluasi Program Pembelajaran : Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, Cetakan III Agustus, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Wiguna, *ICW Temukan Penyimpangan BOS*,Tempo Interaktif, 28 Oktober 2008, (http://www.tempointeraktif.com).

Yusnaeni, 2012, *Transparansi Penggunaan Dana BOS*, Fajar Online : Opini dan Interaktif ; Rabu 23 Mei 2012 Pukul : 23:30:24 Wita.

Zainuddin M, Dr., MA. dan Masyhuri, Dr., MP., *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung. Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), 2011.